

ANALISIS KINERJA BELANJA PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ALOR

Nur Abidin Kasim¹⁾ Herni Sunarya²⁾ Fitriningsih Amalo²⁾

¹⁾*Alumni Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*

²⁾*Dosen Tetap Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kupang*

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui Kinerja Belanja pada kantor Badan Lingkungan Hidup kabupaten Alor ditinjau dari Varians Belanja, Pertumbuhan Belanja, Efisiensi Belanja dan Kecerahan Belanja. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia terkait belanja public terutama belanja operasional dan belanja modal tahun 2013, 2014 dan 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak terjadi penyimpangan/kesalahan anggaran karena total belanja tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Ada pun nilai varian dari anggaran dan belanjanya adalah untuk tahun 2013 sebesar Rp. 159,235,500 atau 7,43%, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 82,523,601 atau sebesar 3,42% dan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 266,278,267 atau sebesar 8,22%, Pertumbuhan belanja dari tahun 2013 ketahun 2014 sebesar 11,10% dan 2014 ketahun 2015 sebesar 25,52% sesuai standar kinerja menunjukkan angka positif, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pertumbuhan belanja dalam kategori baik, Prosentase belanja tahun 2013 sebesar 92,57% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, prosentase belanja tahun 2014 sebesar 96,58% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, dan prosentase belanja tahun 2015 sebesar 91,78% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, namun belum ada keserasian antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor.

Kata Kunci: Belanja Operasi, Belanja Publik dan Kinerja Belanja

PENDAHULUAN

Di era otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Di sisi lain, masih terdapat pula ketimpangan sosial-ekonomi akibat dari terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor produksi yang menyebabkan produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang rendah (Miskin). Seiring perkembangan waktu, potensi meningkatnya kesenjangan hingga saat ini pun masih relatif cukup besar, dan memunculkan dikotomi antar pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta antara daerah maju dan daerah terbelakang. Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk lebih memiliki sifat – sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai analisis dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan kedepan juga menyangkut berbagai dimensi pengukuran yang berguna untuk pengembangan program Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor.

Data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat kabupaten / kota, maupun di tingkat komunitas. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator – indikator yang realistis

yang dapat diterjemahkan ke berbagai kebijakan dan program yang perlu dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator – indikator tersebut antara lain kegiatan pengkajian dampak lingkungan, kegiatan pengelolaan limbah, pengadaan sarana dan prasarana pencegahan pencemaran, kegiatan peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan pengendalian kerusakan sumber – sumber air, kegiatan peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup, Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan persampahan, Bimbingan teknik persampahan, Pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, Pengkajian dampak lingkungan, Penataan ruang terbuka hijau, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan hidup, Gerakan penghijauan berbasis masyarakat, Koordinasi kota sehat / adipura, Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, Pengelelolaan terumbu karang, mangrove, padang lamun, esturia dan teluk, Perlindungan dan konservasi daerah tangkapan air

Kecenderungan yang terjadi pada perencanaan program di Badan Lingkungan Hidup daerah adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepentingan sosial masyarakat, sehingga program yang ditentukan terkadang sulit untuk direalisasikan. Hal lain juga yang biasanya terjadi adalah rendahnya realisasi belanja program yang telah direncanakan sehingga menimbulkan varians belanja yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah a) mengetahui Kinerja Belanja pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten Alor ditinjau dari Varians Belanja, b) mengetahui Kinerja Belanja pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten Alor ditinjau dari Pertumbuhan Belanja, c) mengetahui Kinerja Belanja pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten Alor ditinjau dari Efisiensi Belanja, d) mengetahui Kinerja Belanja pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten Alor ditinjau dari Keserasian Belanja.

TINJUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku (Abdul Halim, 2007:23). Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu:

- a. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber penerimaan daerah, seperti : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain dan atau hak untuk menerima sumber - sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah;
- b. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang yang digunakan untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Kinerja

Menurut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menjelaskan pengertian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi, organisasi.

Sedangkan menurut Indra Bastian (2001 : 329), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Pengukuran Kinerja

Mahsun(2006 : 147) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang yang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Ihyahul Ulum (2009: 21) mendefinisikan bahwa Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud; *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sector publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Larry D. Stout dalam Indra Bastian(2001 : 329), mengemukakan pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses. Maksudnya adalah setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan dalam visi dan misi organisasi. Produk dan jasa yang dihasilkan diukur berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian visi dan misi organisasi.

Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Berdasarkan pasal 53, Permendagri 59/2007 dinyatakan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Analisis Kinerja Belanja

Analisis kinerja belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomi, efisien, dan efektif (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan hal itu menunjukkan efisiensi belanja. Dalam hal belanja daerah penting jugadialisis keserasian belanja karena hal itu terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi dan studi kasus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2011: 29), metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini untuk menganalisis kinerja belanja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Alor merupakan salah satu dari lembaga teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Alor nomor 7 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dengan tugas pokok dan fungsi dijabakan lebih lanjut dengan peraturan Bupati Alor Nomor 43 Tahun 2007 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Alor.

Analisis Varian Belanja

Keterangan	Anggaran	Realisasi	Varians	%
Varians Belanja Tahun 2013	2,144,304,625	1,985,069,125	159,235,500	7.43
Varians Belanja Tahun 2014	2,411,993,400	2,329,469,799	82,523,601	3.42
Varians Belanja Tahun 2015	3,238,606,000	2,972,327,733	266,278,267	8.22

Berdasarkan hasil perhitungan varians dalam tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja lebih kecil dari dari anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi penyimpangan / kesalahan anggaran karena total belanja tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Adapun nilai varian dari anggaran dan belanjanya adalah untuk tahun 2013 sebesar Rp. 159,235,500 atau 7,43%, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 82,523,601 atau sebesar 3,42% dan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 266,278,267 atau sebesar 8,22%

Berdasarkan penjelasan di atas, selisih realisasi pengeluaran (belanja) merupakan selisih yang disukai (*favourable variance*). Hal ini karena realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya yang menunjukkan adanya efisiensi anggaran. Dengan demikian kinerja belanja dinilai dalam kategori baik.

Analisis Pertumbuhan Belanja

a. Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2013 ke 2014

Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t &= \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Belanja Tahun } (t-1)} \times 100 \% \\ &= \frac{2,411,993,400 - 2,144,304,625}{2,144,304,625} \times 100 \% \\ &= \frac{267,688,775}{2,144,304,625} \times 100 \% \\ &= 12,48\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 11,10% dan sesuai standar kinerja menunjukkan angka positif, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pertumbuhan belanja dalam kategori baik.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Tahun 2014 ke 2015

Rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t-1) \\ \text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t &= \frac{\text{Belanja Tahun } t - \text{Belanja Tahun } (t-1)}{\text{Belanja Tahun } (t-1)} \times 100\% \\ &= \frac{3,238,606,000 - 2,411,993,400}{2,411,993,400} \times 100\% \\ &= \frac{826,612,600}{2,411,993,400} \times 100\% \\ &= 25,52\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 25,52%, dan sesuai standar kinerja menunjukkan angka positif, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pertumbuhan belanja dalam kategori baik.

Analisis Efisiensi Belanja

Keterangan	Perhitunagn			%	Kategori
Tahun 2013	1,985,069,125	X	100%	92.57	Baik
	2,144,304,625				
Tahun 2014	2,329,469,799	X	100%	96.58	Baik
	2,411,993,400				
Tahun 2015	2,972,327,733	X	100%	91.78	Baik
	3,238,606,000				

Hasil penelitian sebagaimana dijelaskan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2013 prosentase belanja sebesar 92,57% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, tahun 2014 prosentase belanja sebesar 96,58% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, tahun 2015 prosentase belanja sebesar 91,78% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik.

Analisis Keserasian Belanja Operasi dengan Belanja Publik

a. Analisis Rasio Belanja Operasi

Keterangan	Belanja Operasi			
	Perhitungan			%
Tahun 2013	<u>2,245,696,200</u>	x	100%	58.70
	3,825,666,100			
Tahun 2014	<u>2,775,346,600</u>	x	100%	63.48
	4,372,115,676			
Tahun 2015	<u>2,964,775,400</u>	x	100%	63.92
	4,638,020,600			

Hasil penelitian sebagaimana dalam perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio belanja operasi tahun 2013 mencapai 58,70%, rasio belanja operasi tahun 2014 mencapai 63,48% dan rasio belanja operasi tahun 2015 mencapai 63,92. Dari hasil capaian rasio tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap tahun belanja operasi mengalami peningkatan yakni dari tahun 2013 ke tahun 2014 rasio belanja operasi meningkat sebesar 4,78% (63,48% - 58,70%) dan peningkatan belanja operasi dari tahun 2014 ke Thun 2015 sebesar 0,44% (63,92% - 63,48%). Hasil wawancara dengan pimpinan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menunjukkan bahwa peningkatan ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain adanya tambahan tenaga kontrak, adanya perjalanan dinas diluar yang ditargetkan seperti ada undangan menghadiri acara kenegaraan yang dilaksanakan di propinsi dan di tingkat pusat, rutinitas pertemuan internal yang meningkat dan lain-lain.

b. Analisis Rasio Belanja Publik (Belanja Modal)

Keterangan	Belanja Modal			
	Perhitunagn			%
Tahun 2013	$\frac{1,579,969,900}{3,825,666,100}$	x	100%	41.30
Tahun 2014	$\frac{1,596,769,076}{4,372,115,676}$	x	100%	36.52
Tahun 2015	$\frac{1,673,245,200}{4,638,020,600}$	x	100%	36.08

Hasil penelitian sebagaimana dalam perhitungan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio belanja publik tahun 2013 mencapai 41,30%, rasio belanja publik tahun 2014 mencapai 36,52% dan rasio belanja publik tahun 2015 mencapai 36,08%. Dari hasil capaian rasio tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap tahun belanja publik mengalami penurunan yakni dari tahun 2013 ke tahun 2014 rasio belanja publik menurun sebesar 4,78% (41,30% - 36,52%) dan penurunan belanja publik dari tahun 2014 ke Thun 2015 sebesar 0,44% (36,52% - 36,08%). Hasil wawancara dengan pimpinan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor menunjukkan bahwa menurunnya belanja public ini disebabkan oleh meningkatnya belanja operasional, seperti terlihat pada tabel berikut.

Keterangan	Belanja Operasi	Belanja Modal	Selisih %	Keseserasian
	%	%		
Tahun 2013	58.70	41.30	17.40	Belum Serasi
Tahun 2014	63.48	36.52	26.96	Belum Serasi
Tahun 2015	63.92	36.08	27.85	Belum Serasi

Hasil penelitian sebagaimana dalam tabel di atas menunjukkan bahwa belum adanya keserasian antara belanja operasi dengan belanja modal pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor. Hal ini sangat beralasan karena hasil penelitian menunjukkan bahwa tahun

2013 belanja operasi lebih besar dari belanja public senilai 17,40%, tahun 2014 belanja operasi lebih besar dari belanja public senilai 26,96% dan tahun 2015 belanja operasi lebih besar dari belanja public senilai 27,85%.

Hasil penelitian sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Alor khususnya Badan Lingkungan Hidup dalam merancang dan merealisasikan program belum memperhatikan kesejahteraan masyarakat banyak atau kesejahteraan public, dan masih berorientasi pada kepentingan operasional dan kepentingan serta kesejahteraan pegawainya.

KESIMPULAN

Hasil analisis dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak terjadi penyimpangan/kesalahan anggaran karena total belanja tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Adapun nilai varian dari anggaran dan belanjanya adalah untuk tahun 2013 sebesar Rp. 159,235,500 atau 7,43%, untuk tahun 2014 sebesar Rp. 82,523,601 atau sebesar 3,42% dan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 266,278,267 atau sebesar 8,22%.
2. Pertumbuhan belanja dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 11,10% dan 2014 ke tahun 2015 sebesar 25,52% sesuai standar kinerja menunjukkan angka positif, maka dapat dikatakan bahwa kinerja pertumbuhan belanja dalam kategori baik.
3. Prosentase belanja tahun 2013 sebesar 92,57% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, prosentase belanja tahun 2014 sebesar 96,58% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik, dan prosentase belanja tahun 2015 sebesar 91,78% sehingga masuk dalam kategori kinerja baik.
4. Belum ada keserasian antara belanja operasi dengan belanja modal pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Alor.

DAFTAR PUSTAKA

- Ihyahul Ulum, 2009; *Perencanaan Anggaran Kinerja*, Memangkas Inefisiensi Anggaran Daerah, Semawa Center; Yogyakarta
- Indra Bastian, 2001; *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat; Jakarta.
- Mahsun Mohamad, 2006; *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Balai Penerbit Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.